



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BRUSLI UMBOH
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 721724

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **800.000.000**

1. Tanah Seluas 2.670 m2 di KAB / KOTA MINAHASA TENGGARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/200 m2 di KAB / KOTA MINAHASA TENGGARA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **77.500.000**

1. MOTOR, SUSUKI SMAHS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, AVANSA LUXURY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **7.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **886.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **886.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.